



Buletin Parlementaria



DPR Awasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024



3 Tegakkan Praktik Demokrasi, Jaga Konstitusi yang Semakin Beradab



11 Gobel Tegaskan Bansos dan BLT Bukan Solusi Berantas Kemiskinan

Nomor 1280/II/II/2024 • Februari 2024



9 772614 339005



DPR Awasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Komisi II DPR RI memastikan persiapan Pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2) mengatakan Pemilu 2024 didukung oleh anggaran proposional

Keputusan ini diambil demi menjamin para pekerja yang terlibat sekaligus penyelenggaraannya agar mampu dijangkau dari Sabang hingga Merauke. Upaya ini bukan hanya sekadar bualan. Tidak hanya itu, ia juga berharap isu kendala teknis penyelenggaraan pemilu bisa ditekan secara signifikan sehingga setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar.

"Penambahan anggaran (pemilu) itu karena pemerintah dan DPR punya perhatian yang luar biasa terhadap penyelenggaraan. Peningkatan SDM ini memang perlu dibarengi dengan alokasi anggaran yang cukup supaya berkualitas," ungkap Doli dalam forum tersebut.

Sementara itu, tingginya curah hujan saat mendekati hari pelaksanaan Pemilu 2024, membuat penyelenggara pemilu harus bekerja lebih ekstra untuk mengamankan seluruh peralatan yang akan digunakan untuk pemungutan suara.

"Ini kita tekankan kepada penyelenggara Pemilu, sekarang sedang musim hujan terkait penyimpanan logistik harus benar-benar diperhatikan dan dipastikan agar aman dari banjir dan kebocoran akibat hujan deras yang bisa merusak kertas suara, kotak suara dan lain sebagainya," ujar Wakil Ketua Komisi II



FOTO: PDI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

”

INI KITA TEKANKAN KEPADA PENYELENGGARA PEMILU, SEKARANG SEDANG MUSIM HUJAN TERKAIT PENYIMPANAN LOGISTIK HARUS BENAR-BENAR DIPERHATIKAN DAN DIPASTIKAN AGAR AMAN DARI BANJIR DAN KEBOCORAN AKIBAT HUJAN DERAS YANG BISA MERUSAK KERTAS SUARA, KOTAK SUARA DAN LAIN SEBAGAINYA.

DPR RI Saan Mustopa Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/2).

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati mengungkapkan temuan krusial terkait Juknis Pemilu di beberapa provinsi yang dianggap tidak sejalan dengan regulasi. Haeny menyoroti perbedaan antara Juknis KPU dan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 348 Ayat 2 terkait persyaratan identitas kependudukan pemilih.

"KPU yang menyatakan bahwa itu bertentangan dengan UU atau mohon maaf tepatnya tidak sesuai kutipannya dengan perintah undang-undang dalam hal ini adalah menyangkut tentang identitas kependudukan dari pemilih di UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 348 sudah cukup jelas dijelaskan tetapi KPU menyampaikan bahwasanya yang harus dibawa adalah KTP elektronik," urainya saat Kunjungan Kerja di Surabaya, Rabu (7/2). ts.pdt.gys/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





Tegakkan Praktik Demokrasi, Jaga Konstitusi yang Beradab



FOTO: MRU/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (6/2/2024).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan DPR RI berkomitmen untuk menegakkan praktik berdemokrasi sesuai amanat konstitusi. Maka dari itu, DPR RI dengan seluruh Alat Kelengkapannya (AKD), memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan Pemilu 2024 agar sesuai dengan amanat konstitusi dalam masa sidang ini.

"Inti dari pemilu adalah Rakyat menggunakan haknya, menjalankan kedaulatannya untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya; Hak Rakyat untuk memilih secara bebas," ujar Puan ketika menyampaikan pidatonya saat Rangka Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (6/2).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa negara tidak boleh mengurangi hak rakyat dalam menjalankan kedaulatannya.

Sehingga, harus diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih sesuai hati nuraninya.

"DPR RI, melalui Alat Kelengkapannya dan fungsi konstitusionalnya, memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia," jelas Puan.

Legislator asal Jawa Tengah ini melanjutkan bahwa DPR RI, melalui AKD terkait, terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, netralitas ASN, netralitas TNI/Polri, syarat dan ketentuan berkampanye, KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya.

hal/aha



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danurtito, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.S

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nachden Iwan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maesynthia, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P. Eki Baehaki, S.Sos. M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunanya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrusna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapannya



Pemilu Gak Bebas, Puan Maharani: Rugi Dong!

*Capek-capek tunggu pemilu,
Tapi ga bebas,
Rugi dong,
Yang benar saja.*

*Capek-capek ke TPS dan nyoblos,
Tapi ga ikut kata hatinya,
Rugi dong,
Yang benar saja.*

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan baris-baris frasa pamungkas diatas saat rapat paripurna berlangsung. Alhasil, seluruh anggota dewan yang mengikuti rapat bertepuk tangan riuh.

Menghitung hari, Puan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu 2024, ungkapnya, secara signifikan menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima mendatang.

"Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera; hidup yang lebih mudah; hidup yang lebih nyaman," tutur Puan saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Diketahui, terhitung sejak 28 November 2023, semarak Pemilu 2024 telah mewarnai aktivitas masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Pelbagai baliho, spanduk, dan umbul terpasang di berbagai lokasi yang menarik perhatian untuk berbagai jenis bola mata. Sosialisasi yang dekat dengan budaya dan



Ketua DPR RI Puan Maharani usai menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Foto: Jka/Pdt

kebiasaan masyarakat setempat pun kerap digelar sebagai sarana edukasi politik.

Wayang, dangdutan, layar tancap, pasar murah, menjadi opsi yang mendekatkan masyarakat dengan agenda politik terkini. Pun, kreativitas komunitas yang dinamis bergerak

mengaet para calon pemilih untuk menancapkan paku di atas kertas surat suara sesuai dengan hati nurani yang dipilih. "Inilah kemeriahan dalam pemilu. Setiap peserta pemilu, beramai-ramai dan berlomba menarik perhatian rakyat untuk dapat dipilih," serunya.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat dan persepsi, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengingatkan agar persatuan dan kesatuan menjadi prioritas utama. Tanpa nilai ini, ucapnya, akan sulit mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks pemilu. "Marilah, rakyat Indonesia gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, untuk Indonesia yang sentosa yang kita cintai bersama," pungkas Cucu Proklamator ini.

ts/aha

”

BAGI RAKYAT, YANG TERPENTING DALAM PEMILU ADALAH MENENTUKAN HIDUPNYA MENJADI LEBIH SEJAHTERA; HIDUP YANG LEBIH MUDAH; HIDUP YANG LEBIH NYAMAN.



Scan QR untuk berita selengkapnya

DPR dan Perangkat Desa Sepakat Hormati Proses Revisi UU Desa

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya terkait revisi Undang-Undang Desa. Baik DPR dan perwakilan perangkat desa sepakat untuk menghormati proses pembahasan RUU Desa yang saat ini sudah dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I (satu).

"DPR melalui Baleg dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya, dan mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan, kemudian akan sama-sama



FOTO: GER/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers usai penutupan masa sidang ke-III, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

”

TIDAK AKAN ADA LAGI MENYAMPAIKAN ASPIRASI SECARA TIDAK TERTIB, NAMUN ASPIRASI MEREKA NANTI TENTU SAJA AKAN KAMI TERIMA DALAM PEMBAHASAN-PEMBAHASAN UNTUK MENERIMA ASPIRASI-ASPIRASI SEBELUM KEMUDIAN REVISI UNDANG-UNDANG DESA ITU DIPUTUSKAN DALAM WAKTU YANG AKAN DATANG.

maupun masyarakat. DPR pun berkomitmen akan terus menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan revisi undang-undang usul inisiatif DPR tersebut.

"Tidak akan ada lagi menyampaikan aspirasi secara tidak tertib, namun aspirasi mereka nanti tentu saja akan kami terima dalam pembahasan-pembahasan untuk menerima aspirasi-aspirasi sebelum kemudian revisi Undang-Undang Desa itu diputuskan dalam waktu yang akan datang," jelasnya kepada awak media. **bia/aha**

menghargai dan menghormati," ujar Puan dalam konferensi pers usai penutupan masa sidang ke-III, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Puan berharap dengan sama-sama menghormati proses perundang-undangan yang ada, nantinya RUU Desa dapat bermanfaat bagi perangkat desa

Scan QR untuk berita selengkapnya



Penerima Bansos Bukan Objek Politik, Negara Harus Lindungi

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra melakukan interupsi di tengah rapat paripurna DPR RI. Dalam Interupsinya Wisnu meminta semua pihak tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada rakyat penerima manfaat bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pasalnya, belakangan ini ia sering mendengar keluhan dari penerima bansos di Dapilnya Jawa Tengah 1 yang dilanda intimidasi karena beda pilihan politik. "Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takutin karena perbedaan pilihan politik. Fenomena ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi demi melindungi hak-hak dasar warga negara," tegasnya saat interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Selasa (6/2).

"Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takutin karena perbedaan pilihan politik," imbuhnya.

Dijelaskan Legislator Fraksi PKS proses pencabutan bansos dilakukan berdasarkan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bukan berdasarkan *like or dislike* penguasa apalagi beda pilihan politik.

Karenanya, ia meminta seluruh Anggota DPR RI sebagai representatif rakyat untuk terus melindungi hak-hak penerima Bansos dan memastikan mereka terbebas dari ancaman dan gangguan. "Saya juga mendorong aparat penegak hukum agar bisa



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra saat interupsi di Rapat Paripurna DPR RI ke 12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Selasa (6/2/2024).

”

SAYA JUGA MENDORONG APARAT PENEGAK HUKUM AGAR BISA RESPONSIF DALAM MERESPON FENOMENA INI DAN MENGAMBIL LANGKAH TERUKUR DEMI TERCIPTANYA SUASANA YANG NYAMAN DAN KONDUSIF.

responsif dalam merespon fenomena ini dan mengambil langkah terukur demi terciptanya suasana yang nyaman dan kondusif," jelasnya.

Menurutnya Bansos adalah bantuan yang bersumber dari APBN dan harus disalurkan secara adil kepada yang membutuhkan. Negara tidak boleh menggunakan bansos sebagai alat dagang atau untuk kepentingan pribadi. Sebagai representasi dari mandat konstitusi, bansos merupakan upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

rnm/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



KIP Hingga Kredit Mahasiswa Bisa Jadi Solusi Ringankan UKT

Polemik pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan skema cicilan lewat *fintech* Danacita menuai banyak kritik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap masih banyaknya mahasiswa yang memiliki potensi tidak mampu membayar UKT.

"Kita merasa prihatin bahwa banyak sekali mahasiswa kita yang memiliki potensi tetapi tidak bisa mampu memenuhi kewajibannya

di dalam membayar uang kuliah," ujar Hetifah kepada **Parlementaria** di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

”

"KITA HARUS MEMBUAT SATU KEBIJAKAN YANG LEBIH BIJAK LAGI SEPERTI KIP KULIAH TENTU SAJA MUNGKIN PROPORSINYA HARUS DITAMBAH LEBIH TEPAT SASARAN LEBIH TEPAT GUNA DAN JUGA NILAINYA DISESUAIKAN DENGAN NILAI UKT.

la kemudian menyebut berbagai solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu mahasiswa tidak lagi kesulitan

menempuh jalur pendidikan tinggi. Pertama, adalah dengan lebih bijak memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kita harus membuat satu kebijakan yang lebih bijak lagi seperti KIP kuliah tentu saja mungkin proporsinya harus ditambah lebih tepat sasaran lebih tepat guna dan juga nilainya disesuaikan dengan nilai UKT," jelasnya.

Kedua, dengan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk dikelola menjadi pinjaman tanpa bunga, seperti misalnya kredit mahasiswa. Sehingga, mahasiswa yang kesulitan membayar UKT dapat memanfaatkan kredit tersebut.

"Dulu waktu saya di ITB kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak merasa khawatir bisa putus di tengah jalan hanya karena masalah biaya atau ekonomi," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar itu. Kedepan, Hetifah mengatakan Komisi X akan segera membahas permasalahan tersebut dengan Kemendikbudristek dan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. **bia/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

FOTO: JKA/PDT

KAI Jangan Buru-Buru Impor KRL China, Prioritaskan Produk Dalam Negeri!

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor tiga rangkaian KRL baru dari China. Pengadaan tersebut sebagai langkah KAI Commuter dalam memenuhi sarana KRL untuk mengakomodir pengguna KRL Jabodetabek yang diharapkan 2 juta lebih pengguna perhari pada 2025.

Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan belum mendapatkan

informasi detail terkait impor KRL dari KAI. Untuk itu, pihaknya nanti berencana memanggil KAI untuk

”

NANTI AKAN KITA PANGGIL PT KAI, JANGAN SAMPAI INI MENIMBULKAN PERDEBATAN BARU YANG KEMARIN SUDAH TERJADI.

menjelaskan kajian hingga alasan impor KRL dari China tersebut.

“Nanti akan kita panggil PT KAI, jangan sampai ini menimbulkan perdebatan baru yang kemarin sudah terjadi,” ungkap Sarmuji kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengingatkan agar KAI tidak terburu-buru dalam melakukan impor kereta. Andaikan terpaksa karena kebutuhan mendesak, ia berharap KAI menjelaskan terlebih dahulu kepada Komisi VI tentang kajian yang jelas dan alasan dilakukannya impor.

“Harus dilakukan secara transparan agar publik juga mengetahui mengapa memilih impor terutama impor dari negara China. Karena sebelumnya juga ada pembicaraan waktu itu impornya dari Jepang kemudian beralih ke China. Tentu kita akan meminta alasan pembelian melalui impor dan mengapa impornya dari China,” jelasnya.

Ia pun berharap nantinya KAI dapat memprioritaskan produksi dari dalam negeri terlebih dahulu. Sehingga, industri kereta api dalam negeri dapat ikut merasakan manfaat dari tumbuhnya moda transportasi kereta api.

“Kita ingin memprioritaskan produksi dalam negeri supaya BUMN yang bisa memproduksi gerbong kereta api itu juga bisa mendapatkan manfaat dari tumbuhnya transportasi terutama modal kereta api,” harapnya.

bia/rdn



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Terus Lakukan Aksi Konkret Hentikan Genosida oleh Israel

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyerukan agar Indonesia kerap beraksi konkret guna mendesak PBB beserta Dewan Keamanan PBB menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Jalur Gaza. Menurutnya, saat ini rakyat di Jalur Gaza menuju pada ambang kepunahan.

Pernyataan ini diutarakannya saat menyampaikan Interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 Dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

"Hari ini 6 Februari 2024 merupakan hari ke-123 aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Izinkan kami kesempatan ini menyampaikan

sikap pertama mengutuk keras sikap komunitas internasional terutama PBB yang belum bisa menghentikan aksi genosida Israel ini. Kini kemanusiaan menjadi linimasa keseharian masyarakat global," ungkap Sukamta.

Politisi Fraksi PKS itu melanjutkan serangan membabi

statistik mengerikan. Ini adalah manusia yang memiliki nama, memiliki orang tua, dan memiliki keluarga. Namun, ini belum mampu menghadirkan aksi nyata masyarakat global untuk segera menghentikan Aksi genosida Israel ini," tegasnya.

Di akhir, dirinya mendukung dan



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

buta 24 jam yang dilakukan terakhir tersebut juga menunjukkan keputusan sementara Mahkamah Internasional atau ICJ seperti angin lalu. Ia menilai perintah ICJ yang meminta agar Israel melakukan pencegahan aksi genosida benar-benar tidak diindahkan.

Sukamta menilai bahwa Israel tidak menunjukkan niat baik untuk berdamai, Israel tanpa rasa malu terus melakukan serangannya. "Angka-angka dan

mendorong penuh kesinambungan peran proaktif pemerintah Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dalam upaya mewujudkan perdamaian abadi agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. "Termasuk penjajahan Israel atas Palestina," pungkasnya.

hal/rdn

”

APALAGI, DALAM WAKTU DEKAT KITA MASYARAKAT AKAN BERSIAP UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN MUDIK LEBARAN. KARENYA PENINGKATAN INI HARUS SEGERA DILAKUKAN, TERMASUK SOAL KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR- INFRASTRUKTUR JALAN YANG MEMADAI.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Parlemen Negara Sahabat Pantau Pemilu, Kesepakatan AIPA

Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil, DPR RI mengundang parlemen negara sahabat, duta besar, dan organisasi parlemen internasional untuk memantau penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan dalam kegiatan bertajuk 'Election Visit Programme 2024' ini, DPR RI menjalankan fungsi diplomasi dengan menjadikan para delegasi dunia tersebut sebagai pemantau atau observer guna ikut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

"Dalam peran diplomasi DPR RI mengundang beberapa parlemen negara, sahabat serta organisasi parlemen internasional untuk mengamati secara langsung jalannya



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (6/2/2024).

”

APALAGI, DALAM WAKTU DEKAT KITA MASYARAKAT AKAN BERSIAP UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN MUDIK LEBARAN. KARENYA PENINGKATAN INI HARUS SEGERA DILAKUKAN, TERMASUK SOAL KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR- INFRASTRUKTUR JALAN YANG MEMADAI.

Pemilu 2024 di Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2024," Kata Puan dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (6/2).

Dijelaskan Puan, hal ini sejalan dengan hasil kesepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan Pemilu agar mengundang anggota

AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer Pemilu.

Hingga berita ini ditulis (9/2), sudah ada 19 negara sahabat dan tiga organisasi parlemen internasional mengkonfirmasi akan menjadi pemantau atau observer pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.

Diketahui, observer akan meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. [we/aha](#)



Gobel Tegaskan Bansos dan BLT Bukan Solusi Berantas Kemiskinan

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengungkapkan segala jenis bantuan sosial bukan solusi untuk memberantas kemiskinan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Pemerintah yang menyalurkan bantuan itu sebaiknya memikirkan solusi terbaik lainnya, seperti menciptakan lapangan kerja.

"Pemberian Bansos, Sembako dan BLT itu sebenarnya bukan solusi memberantas kemiskinan. Itu bersifat jangka pendek, darurat dan sementara. Solusi terbaik adalah dengan menciptakan lapangan kerja agar pengangguran berkurang dan membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya," ujar Gobel dalam acara Festival Pasar Pangan atau pasar murah untuk produk sembako di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, baru-baru ini

Hal itu, lanjut Gobel, akan dilakukannya melalui Visi 2051 dengan membangun Pelabuhan Internasional Anggrek dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pangan. Ia menginvestasikan dana Rp1,4 triliun. Investasi itu akan menarik investasi tambahan antara Rp5 triliun-Rp10 triliun.

"Dalam 30 tahun akan tercipta sekitar 100 ribu lapangan kerja baru. UMKM akan tumbuh menopang industri," terangnya. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa khusus untuk Gorontalo



FOTO: DOK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

yang notabene merupakan daerah pemilihannya (dapilnya), pilihan terhadap industri pangan karena tanah Gorontalo yang sangat subur dan lautnya kaya ikan.

Tak heran, profesi terbesar penduduk Gorontalo adalah di bidang pertanian dan kelautan. Jika APBD berpihak kepada petani dan nelayan, maka persoalan kemiskinan lebih mudah diatasi.

Sebagai orang yang ikut berkontribusi dalam mendirikan Provinsi Gorontalo pada 2000, Gobel mengaku sedih dan prihatin daerahnya konsisten sebagai Provinsi termiskin ke Lima di

Indonesia. Padahal Provinsi tersebut didirikan dengan tujuan Gorontalo yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih mandiri.

Bahkan APBD terus meningkat dan bantuan APBN dari pusat pun bertambah. Untuk itulah Gobel mengajukan Visi 2051 untuk membangun Gorontalo yang maju dan sejahtera. Jangan sampai kita mewariskan kemiskinan kepada generasi penerus. Kami punya konsep dan gagasan untuk membangun Gorontalo," pungkasnya. **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



RRI Bandung Harus Jadi Media Terpercaya Tangkal Berita Hoaks

Dalam upaya menjaga integritas dan keamanan proses demokrasi menjelang Pemilihan Umum 2024, Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menegaskan, Radio Republik

online yang lain cepat itu adalah jawaban. Tetapi untuk RRI menurut saya utamakan kepercayaan publik dengan menyediakan informasi yang valid," ujar Junico Siahaan dalam Kunjungan kerja Reses Komisi I DPR RI ke RRI Bandung, pada Rabu (8/2).

Legislator PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks. Menurutnya, RRI Bandung sebagai salah satu media yang memiliki jangkauan luas di masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini.

"Yang paling penting adalah RRI sebagai media milik pemerintah dengan jangkauan yang luas harus tetap menjaga komitmennya dalam mengemban tanggung jawab besar memberikan informasi yang akurat dan kredibel, agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses demokrasi yang sehat," tutup Junico Siahaan. **blf/aha**

”

BAHWA RRI INI HARUS BISA LEBIH SELEKTIF LAGI MENERJAKAN HAL-HAL SEBAGAI MEDIA PEMERSATU BANGSA, DENGAN MEMASTIKAN INFORMASI YANG DISEBARKAN BUKAN HOAKS. RRI TIDAK PERLU BURU-BURU SOAL PEMBERITAAN KARENA KALAU DI PEMBERITAAN ONLINE YANG LAIN CEPAT ITU ADALAH JAWABAN. TETAPI UNTUK RRI MENURUT SAYA UTAMAKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DENGAN MENYEDIAKAN INFORMASI YANG VALID,

Indonesia (RRI) Bandung harus memperkuat tugasnya sebagai media pemersatu bangsa. RRI juga harus memastikan informasi yang disebarakan terpercaya bukan berita hoaks.

Junico Siahaan menyatakan bahwa, keberadaan media seperti RRI memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya informasi yang akurat dan kredibel, terutama di tengah maraknya penyebaran berita palsu di era media baru yang mengutamakan kecepatan ketimbang keakuratan berita seperti saat ini.

"Bahwa RRI ini harus bisa lebih selektif lagi mengerjakan hal-hal sebagai media pemersatu bangsa, dengan memastikan informasi yang disebarakan bukan hoaks. RRI tidak perlu buru-buru soal pemberitaan karena kalau di pemberitaan



FOTO: BLF/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan saat mengikuti pertemuan Kunjungan kerja Reses Komisi I DPR RI ke RRI Bandung, pada Rabu (8/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dalami Pemetaan Kerawanan Pemilu di Provinsi Banten

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada Rabu (7/2). Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Banten yang diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan tersebut, tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI mendapatkan paparan terkait pemetaan kerawanan pemilu di wilayah Provinsi Banten.

"Kita dapat penjelasan dari Kabinda yang cukup komprehensif dan secara detail bagaimana mengantisipasi dan mendeteksi dini persiapan pemilu bahkan, pasca pemilu juga. Bahwa di Banten ini insya Allah relatif cukup bagus," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini yang juga didapuk sebagai pimpinan rapat.

Pada kesempatan yang sama, Legislator Dapil Banten II ini mengingatkan bahwa pemilihan umum serentak yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang tak hanya melibatkan KPU dan Bawaslu. Lebih dari itu, Jazuli menuturkan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga berperan dalam pesta demokrasi ini seperti aparat TNI dan Polri hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Politisi Fraksi PKS ini lantas berharap adanya sinergisitas dari kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan pemilu yang damai serta menjunjung tinggi asas "Luber-Jurdil" atau Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

"Banyak pihak-pihak lain yang terlibat (dalam pemilu) baik itu polisi, TNI dan lain-lain itu juga dibutuhkan kerja sama dan koordinasi dan

komunikasi yang sinergis antara pihak-pihak demi terwujud dan terlaksananya pemilu dengan damai, dengan jurdil sehingga

”

KITA DAPAT PENJELASAN DARI KABINDA YANG CUKUP KOMPREHENSIF DAN SECARA DETAIL BAGAIMANA MENGANTISIPASI DAN MENDETEKSI DINI PERSIAPAN PEMILU BAHKAN, PASCA PEMILU JUGA. BAHWA DI BANTEN INI INSYA ALLAH RELATIF CUKUP BAGUS.

lahir pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh mayoritas rakyat republik Indonesia baik itu yang ada di eksekutif dan yang ada di legislatif," tutup Politisi Fraksi PKS itu.

Menilik dari anggaran Pemilu, setidaknya terdapat 14 kementerian/ lembaga lain di luar KPU dan Bawaslu yang ikut berperan dalam pengamanan, pengawasan dan penyelenggara pemilu. Beberapa diantaranya antara lain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga lembaga penyiaran TVRI dan RRI. [uc/rdn](#)



FOTO: LUCIA/POT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini saat melakukan kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Banten pada Rabu (7/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Soroti Kesiapan Aplikasi Pemilu, SILON dan SILOG

Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati memberikan perhatian khusus terhadap aspek aplikasi yang digunakan oleh KPU, termasuk Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Logistik (SILOG). Dalam rangka mengevaluasi kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Haeny mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak banjir di Jawa Tengah

yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi logistik pemilu di Jawa Timur. "Banjir di Jawa Tengah

”

EVALUASI INI DIHARAPKAN DAPAT MEMASTIKAN BAHWA TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN OLEH KPU, SEPERTI SILON DAN SILOG, SIAP DIGUNAKAN SECARA OPTIMAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA LOGISTIK PEMILU.

kemarin dapat berpengaruh terhadap logistik pemilu di Jawa Timur," ujarnya Haeny saat diwawancarai **Parlementaria** di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2)

Ia menyoroti pentingnya aplikasi SILON dalam proses pemilu. "KPU telah memiliki delapan aplikasi, termasuk SILON, yang memiliki peran penting dalam tahapan pemilihan. Namun, saat saya mengakses websitenya KPU hari ini, terutama untuk aplikasi SILOG, belum ada keterangan," tambah Haeny.

Haeny menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap logistik pemilu di Jawa Timur. "Saya meminta agar segera dilakukan monitoring dan evaluasi terkait logistik Pemilu ini, terutama terkait aplikasi SILOG," ungkapnya.

Dalam konteks ini, Haeny Relawati berharap agar evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan segera untuk memastikan kelancaran persiapan pemilu. Dengan logistik pemilu yang sudah masuk ke kotak-kotak suara dan distribusinya hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) per 31 Januari, langkah evaluatif ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu di Jawa Timur.

"Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa teknologi yang digunakan oleh KPU, seperti SILON dan SILOG, siap digunakan secara optimal dalam menghadapi dinamika logistik Pemilu," tutupnya.

 gys/aha



Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja reses di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).

FOTO: GYS/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tanam 5 Juta Pohon Imbas Banyak Kertas untuk Surat Suara

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar mengapresiasi inisiatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa penyelenggaraan program penanaman bibit pohon sebagai pengganti kertas selama Pemilu 2024. Ia mendukung program ini digelar secara berkelanjutan.

"Saya mengapresiasi penanaman pohon (yang dilakukan KPU) ini. Banyak kertas surat suara yang dicetak yang tentu berasal dari pohon. Ini patut dilanjutkan (programnya) sebagai bagian dari aksi penghijauan," tutur Chairul kepada **Parlementaria** dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2).

Menghitung hari jelang waktu pencoblosan, ia berharap minim terjadi permasalahan selama tahapan tersebut berlangsung. "Walaupun masih ada kurang sedikit (persentase distribusi logistik pemilu) sekitar 2 persen, saya harap bisa dikejar supaya meminimalisir masalah nanti," tandas Politisi Fraksi PKS itu.

Diketahui, program penanaman 5 juta bibit pohon ini merupakan simbol rasa syukur atas penyelenggaraan Pemilu 2024. Maka dari itu, KPU berinisiatif melakukan reboisasi.

Penanaman pohon diselenggarakan secara serentak di Indonesia dengan total penanaman bibit sebanyak

**”
EVALUASI INI
DIHARAPKAN
DAPAT
MEMASTIKAN
BAHWA
TEKNOLOGI YANG
DIGUNAKAN OLEH
KPU, SEPERTI
SILON DAN SILOG,
SIAP DIGUNAKAN
SECARA
OPTIMAL DALAM
MENGHADAPI
DINAMIKA
LOGISTIK
PEMILU.**

5.709.898 batang pohon, yang tersebar di 117.826 lokasi. Harapannya dari bibit pohon tersebut bisa menghasilkan 66.234 ton kertas atau sebanding dengan yang digunakan Pemilu 2024. Di mana, total kebutuhan kertas untuk logistik Pemilu 2024 sekitar 65.998 ton. **ts/rdn**



FOTO: TS/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi VII Apresiasi BRIN Dalam Kelola Kebun Raya Bogor

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Edy Soeparno mengapresiasi kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengelola Kebun Raya Bogor. Kebun berfungsi sebagai pusat penelitian dan konservasi tumbuhan, memiliki peran penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi BRIN dalam mengelola Kebun Raya Bogor ini. Peralannya sebagaimana diketahui Kebun raya tertua di Indonesia ini selain sebagai tempat wisata, juga berhasil menjadi tempat riset dan konservasi berbagai sumber daya alam hayati," ujar Edy dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2). Pusat konservasi ini

pun menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan eksploitasi yang masif.

Meski demikian, Edy memberikan beberapa catatan atau masukan untuk BRIN dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor. Salah satunya terkait juga keluhan dari masyarakat akan harga yang cukup mahal dari resto yang ada di Kebun Raya tersebut.

Politisi Fraksi PAN ini berharap resto atau cafe yang berada dalam kebun raya, yang notabene juga bermitra dan berada di bawah pengelolaan BRIN untuk menerapkan harga yang lebih terjangkau.

Mengingat, pengunjung tempat wisata tersebut juga berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu juga, harga yang terjangkau dapat menarik masyarakat untuk terus mengunjungi kebun raya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengungkapkan rasa terimakasihnya atas apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi VII, baik terhadap BRIN secara langsung, maupun dalam pengelolaan Kebun Raya.

"Terkait masukan dari Komisi VII tentang harga menu makanan di cafe atau resto di Kebun Raya Bogor, kami setuju bahwa harga juga harus terjangkau. Oleh karena itu kami juga akan membuka opsi-opsi lain untuk cafe yang lebih terjangkau. Hal itu masih sangat dimungkinkan, agar pengunjung juga semakin bertambah," jelas Laksana.

Dalam kesempatan itu, hadir juga beberapa anggota Komisi VII DPR RI lainnya, seperti Tifatul Sembiring, Asman Abnur, Mulyanto, Ribka Tjiptaning, Bambang Hermanto, dan Ryan Firmansyah. **ayu/aha**



FOTO:AYU/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Edy Soeparno saat bertukar cenderamata usai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).



Listrik di Jatim Sering Mati Saat Cuaca Buruk, Komisi VII Desak PLN

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita mengeluhkan aliran listrik yang sering padam di beberapa wilayah pedesaan di Tuban, Jawa Timur. Hal ini semakin kerap terjadi seiring cuaca buruk yang melanda di wilayah tersebut. Ia mendorong agar PLN berusaha untuk terus memperbaiki hal tersebut.

"Pada saat ini yang cuacanya tidak terlalu baik ternyata keandalan dari elektrifikasi PLN juga belum seberapa baik. Padahal kalau di perkotaan itu menurut kami sudah relatif lebih baik. Jadi saya mohon andalannya ini bisa lebih diseimbangkan antara perkotaan dengan pedesaan. Karena bagaimanapun negara juga harus bertanggung jawab, kan mereka menggunakan listrik juga tidak gratis. Sehingga keandalannya pun harus bisa dioptimalkan oleh PLN," jelas Ratna saat pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/2).

Sama halnya dengan yang disampaikan Ratna, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam juga mengingatkan PLN untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

"Tapi rumah kita yg ada di desa, disampaikan dari Tuban. Begitu hujan sedikit mati, mrepet, sampai 4 kali. Penyelesaiannya tadi Direktur Manajemen Risiko PLN dalam hal ini Pak Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa GM (General Manager) nya diperintahkan untuk membungkus

”

PADA SAAT INI YANG CUACANYA TIDAK TERLALU BAIK TERNYATA KEANDALAN DARI ELEKTRIFIKASI PLN JUGA BELUM SEBERAPA BAIK. PADAHAL KALAU DI PERKOTAAN ITU MENURUT KAMI SUDAH RELATIF LEBIH BAIK. JADI SAYA MOHON ANDALANNYA INI BISA LEBIH DISEIMBANGKAN ANTARA PERKOTAAN DENGAN PEDESAAN. KARENA BAGAIMANAPUN NEGARA JUGA HARUS BERTANGGUNG JAWAB, KAN MEREKA MENGGUNAKAN LISTRIK JUGA TIDAK GRATIS.

(kabel). Kalau di kota-kota itu dibungkus lalu dimasukkan di bawah tanah sehingga aman, tapi karena di desa itu luas, jadi hanya dibungkus dengan isolasi yang agak murah jadi kena daun," ungkap Hisjam.

Terakhir Hisjam mengingatkan agar situasi seperti ini terutama yg ada di desa, tidak terus terjadi. Mengingat masyarakat desa juga membutuhkan aliran listrik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Karena negara harus hadir di manapun, kepada lapisan masyarakat apapun. **syn/aha**



FOTO: SYN/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita saat pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



PLN Diimbau Tingkatkan Penggunaan Biomassa

Untuk memproduksi energi listrik, PT. PLN diimbau terus memanfaatkan penggunaan biomassa, menggantikan batu bara atau yang populer disebut co-firing. Pada kunjungan kerja ke PT. PLN Adipala, Cilacap, Jateng, Komisi VII DPR RI melihat dari dekat progres pemanfaatan biomassa ini.

Bertemu dengan direksi PLN Adipala, Komisi VII mendapatkan fakta bahwa sudah 2-3 persen

BUMN di Cilacap itu menggunakan biomassa. Sementara sudah beberapa PLN di Indonesia yang 100 persen menggunakan biomassa.

”

YANG HARUS KITA PIKIRKAN, KEBERLANJUTANNYA. ITU MASALAHNYA, KARENA STOK BERUBAH TERUS. LALU APAKAH NANTI ADA PELUANG UNTUK EKSPOR.

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, usai pertemuan, Rabu (7/2), menyampaikan optimismenya, PLN Adipala ini bisa terus meningkatkan penggunaan biomassa. "Kalau lihat laporan mereka tadi, saya kira kita optimis. Khusus di Adipala ini sudah 2-3 persen dan itu progres yang bagus. Di Indonesia ada 4-5 (PLTU) yang sudah 100 persen menggunakan biomassa," ungkapnya.

Yang perlu dipikirkan, lanjut Politisi PKB ini, keberlanjutan stok biomassa untuk diolah menjadi sumber energi. Materi biomassa yang selama ini digunakan adalah bubuk gergaji, cangkang sawit, limbah racik uang kertas (LRUK), dan pelet kayu. Semua stok bahan baku itu selalu berubah, tergantung ketersediaannya. Inilah, katanya, yang harus dipikirkan.

Sementara LRUK dipasok dari Bank Indonesia. Uang-uang kertas yang sobek dan lusuh yang tidak layak pakai, dikirim ke PLN untuk diolah menjadi energi. Dari sekian banyak bahan baku penghasil energi, LRUK merupakan sumber paling tinggi kalori untuk energi. PLN mendapat pasokan dari BI hingga 15 ton.

"Yang harus kita pikirkan, keberlanjutannya. Itu masalahnya, karena stok berubah terus. Lalu apakah nanti ada peluang untuk ekspor," tutur Karding. Semua bahan baku biomassa ini merupakan sumber energi baru dan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pada 2025, PLN Adipala menargetkan penggunaan biomassa hingga 5 persen.

mh/aha



Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja ke PT. PLN Adipala, Cilacap, Jateng.

FOTO: MHN/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya

Baleg - Mendagri Sepakat Masa Jabatan Kades 8 Tahun Maksimal 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

"Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak UU Desa itu direvisi dan sudah kita tangkap itu dan menjadi usulan inisiatif DPR. Dan kemarin janji kita pada masa sidang ini akan disahkan setidaknya di Pengambilan Tingkat 1 di Baleg sesuai penugasan dari Pimpinan," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan saat diwawancarai **Parlementaria**, Senin (5/2).

Sebagaimana diketahui, Berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa), Ketua Panja menyampaikan laporannya sebelum pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I dilakukan.

Setelah melalui pembahasan secara mendalam, dinamis, dan demokratis, Panja pembahasan RUU Desa, secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut. Pertama Penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi, ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;

Lalu Penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam Pilkades; Ketentuan Pasal 39

terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan; Ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; Ketentuan Pasal 118 terkait Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Pasal 121A terkait Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

Hasil Panja kemudian secara resmi disepakati oleh seluruh 9 Fraksi di Pembahasan Tingkat 1 dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Baidowi mengungkapkan, langkah selanjutnya hasil Panja Pembahasan Tingkat 1 tinggal diserahkan ke Rapat Paripurna terdekat. — **pun/aha**

Wakil Ketua Baleg DPR RI
Achmad Baidowi.



FOTO: DEP/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Said Abdullah: Jangan Jadikan orang Miskin Aset Elektoral

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti lonjakan belanja bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun rentan dengan penyalahgunaan dan dapat menimbulkan tendensi politis terutama apabila penyalurannya diberikan di tengah tahun politik.

"Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial 'hanya' Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, pada Selasa (6/2).

Selain membandingkan besaran bansos saat Pandemi Covid-19 dengan besaran bansos terkini, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan ketidakterlibatan Kementerian Sosial dalam pembahasan dan penyaluran Bansos. Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis yang erat kaitannya dengan bansos.

Lebih jauh, ia mengungkapkan keprihatinannya lantaran banyak sektor pembangunan yang terkena "pemotongan" anggaran. Diindikasikan anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos.

Pada, anggaran-anggaran pembangunan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan ekspor,

meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara.

"Saya harapkan APBN 2024 ini kita jaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuannya. Biarkanlah pemilu ini berjalan secara alamiah, se-demokratis mungkin, berjalan tanpa cawe-cawe kekuasaan. Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Sebaliknya Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal," tutur Said yang juga anggota Komisi XI DPR RI.

Said menegaskan bahwa program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin apabila dikerjakan oleh tangan-tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik. Ia pun menekankan agar tidak menjadikan rakyat miskin sebagai aset elektoral.

"Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum," tutup Said. **uc/rdn**



Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.

FOTO: JKA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Penyederhanaan Jabatan Pelaksana Wujudkan Organisasi yang Lebih Lincah

Sebagai langkah mewujudkan pemerintahan yang dinamis, lincah dan profesional, Sekretariat Jenderal DPR RI baru-baru ini melakukan penyederhanaan jabatan pelaksana di lingkungan Setjen DPR. Dari yang sebelumnya 95 (sembilan puluh lima) jabatan pelaksana pegawai negeri sipil (PNS), kini disederhanakan hanya sebanyak 13 (tiga belas) jabatan pelaksana.

Langkah tersebut, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Di mana dalam peraturan tersebut mengatur pengelompokan jabatan pelaksana menjadi tiga kelompok. Yakni kelompok klerek, operator, dan teknisi.

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono mengatakan pengelompokan tersebut membuat organisasi Setjen DPR menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Sebab, tidak ada lagi jabatan yang terkotak-kotak, sehingga membuat organisasi dapat bekerja lebih cepat dan lincah.

"Karena terus terang jabatan pelaksana adalah sebenarnya motor penggeraknya juga daripada organisasi. Kalau sudah terkotak-kotak gini semuanya terikat gitu, tapi dengan 13 (jabatan pelaksana) ini mudah-mudahan dia bisa lebih bekerja cepat, ada kebutuhan begini (lebih mudah) digeser selama dia jabatan pelaksanaannya sama,"

jelasnya dalam acara Sosialisasi Jabatan Pelaksana, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2).

Selain itu, Sumariyandono menjelaskan, penyederhanaan jabatan tersebut juga sebagai langkah Setjen DPR dalam mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia



MUDAH-MUDAHAN JUGA BISA DIPAHAMI TUJUAN UTAMA KESETJENAN INI ADALAH MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOMPETENSI DARIPADA SDM-SDM YANG ADA DI KITA. SEKALIGUS MENGANGKAT JADI TIDAK ADA LAGI YANG KELAS JABATAN 5 (LIMA).

(SDM). Terlebih, dengan penetapan kelas jabatan yang baru, di mana sudah tidak ada lagi kelas jabatan 5 (lima), PNS di lingkungan Setjen DPR yang sebelumnya masih di kelas jabatan 5 dituntut untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan agar dapat naik ke kelas jabatan 6 (enam).

"Mudah-mudahan juga bisa dipahami tujuan utama kesetjenan ini adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi daripada SDM-SDM yang ada di kita. Sekaligus mengangkat jadi tidak ada lagi yang kelas jabatan 5 (lima)," terangnya. **— bia/rdn**



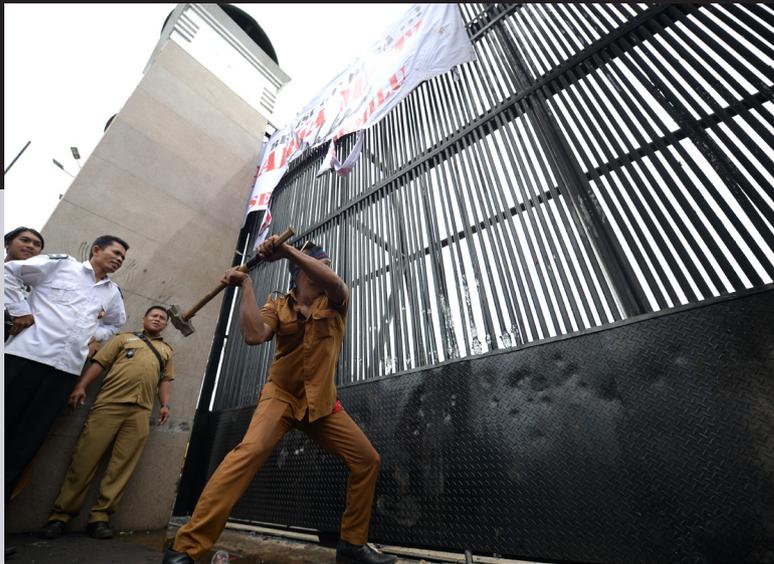
Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono dalam acara Sosialisasi Jabatan Pelaksana, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: XSB/PDT

Ketika Palu Godam Hunjam Pagar Parlemen



"Dum, dum ..." dentuman keras terdengar dari bagian depan tembok Komplek Parlemen. Suara itu berasal dari hantaman palu godam yang diayunkan ke tembok pagar di depan Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Hantaman palu diiringi teriakan dukungan dari para pengunjung rasa. Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berunjuk rasa saat itu sebagian besar datang mengenakan pakaian aparat desa berwarna coklat muda.

Muncul pertanyaan darimana datangnya palu godam tersebut? Pihak kepolisian punya jawabannya, benda penetak itu telah dipersiapkan sebelum aksi dimulai. "Hari ini teman-teman melihat ada aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai pengerusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar, dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan," kata Kapolda Metro Jaya, Irijen

Karyoto kepada wartawan disela-sela pengamanan unjuk rasa di lokasi, Rabu (31/1).

Massa lainnya juga sempat mencoba merobohkan pagar besi DPR RI dengan tali tambang. Namun hal itu gagal setelah seorang polisi memotong tali tambang tersebut. "Ya pasti kita punya dokumentasi, tetapi kan pelan-pelan ya, kita melihat untuk pembelajarannya. Pamong praja secara politik dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku-perilaku seperti itu," lanjut Kapolda Metro Jaya.

Legislator Terima Pendemo

Rencana revisi Undang-Undang (UU) Desa melatarbelakangi aksi demo ini. Meski suasana memanas di depan gerbang, perwakilan parlemen tetap menerima audiensi massa pendemo. Dimana dua Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Santoso dan Luluk Nur Hamidah menerima perwakilan demonstran



Scan QR untuk berita selengkapnya





dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Ruang rapat Pansus, Nusantara II saat itu juga.

Keduanya senada ingin memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan Apdesi. Dalam forum tersebut, Santoso menjelaskan tahapan dalam penyusunan undang-undang, tapi meskipun demikian melihat kondisi tersebut dia akan memperjuangkan agar dalam pembahasan revisi UU Desa ada diskresi. Dalam audiensi ini hadir para perwakilan pengurus termasuk Ketua Umum Apdesi.

"Kemudian saya melihatnya, bahwa kondisi ini harus ada diskresi, ada perlakuan khusus, kami akan perjuangkan. Maka harus ada diskresi dalam undang-undang itu. Jadi saya akan perjuangkan adanya diskresi yang menjadi tuntutan para kepala desa. Jadi apakah waktunya

tepat atau terlambat, tetap akan memprioritaskan apa yang menjadi aspirasi kepala desa," papar Santoso disambut tepuk tangan para perwakilan demonstran, Rabu (31/1).

Di kesempatan yang sama Anggota Baleg DPR RI Lulu Nur Hamidah menyampaikan, akan memperjuangkan pada masa sidang ini revisi UU Desa bisa disahkan. "Kalau memang kita bisa memberikan percepatan kenapa harus ada penundaan, itu sikap yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak. Kita juga meminta dan menghendaki agar, masa sidang ini sebelum pemilu, seharusnya revisi UU ini bisa disahkan, karena ini tugas konstitusional," jelasnya.

Berbuah Apresiasi

Proses politik pun berjalan dinamis, seiring dengan itu aksi demonstrasi pun berlanjut pada Selasa (6/2), pada kesempatan unnuq rasa ini para aparat perangkat desa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan tertib, terdengar secara bergantian para para orator dari Kepala Desa menyampaikan apresiasinya kepada DPR RI.

"Terima Kasih mbak Puan sebagai Ketua DPR RI yang telah mengakomodir para pejuang di desa," ujar salah satu orator berorasi. Baik DPR dan perwakilan perangkat desa sepakat untuk menghormati proses pembahasan RUU Desa yang saat ini sudah dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I (satu).

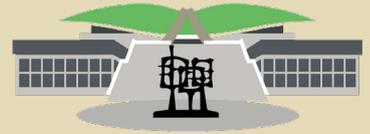


"DPR melalui Baleg dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya, dan mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan, kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati," ujar Puan.

Puan berharap dengan sama-sama menghormati proses perundang-undangan yang ada, nantinya RUU Desa dapat bermanfaat bagi perangkat desa maupun masyarakat. DPR RI pun berkomitmen akan terus menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan revisi undang-undang usul inisiatif DPR tersebut.

ssb,aha,ik/aha





Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Foto: Eno/Pdt

